BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu sektor yang memiliki beberapa aspek yang menarik untuk dikaji, bukan hanya dalam aspek ketahanan, aspek pembiayaan, perolehan pinjaman atau dari aspek manajerial. Dalam era globalisasi sekarang khususnya dengan adanya integrasi ekonomi di Kawasan Asia Tenggara, yaitu penyatuan ekonomi (Economic Union) yang menjadikan Kawasan Asia Tenggara menjadi satu komunitas perekonomian dengan basis produksi tunggal membuat usaha mikro kecil menengah (UMKM) baru mampu mempertahankan eksistensinya ditengah gempuran ekonomi global. Dalam hal ini UMKM dituntut untuk untuk mampu bersaing dan menciptakan produk yang dapat diterima oleh konsumen pasar dalam negeri maupun konsumen di pasar Asia Tenggara.

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan sebuah pilar penting bagi perekonomian sebuah bangsa (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2021). Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008 sebagai sebuah pilar penting bagi perekonomian bangsa Indonesia Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sangatlah penting dalam menyumbangkan Produk Domestik Bruto (PDB) serta berperan dalam penyerapan tenaga kerja. (V. Wiratna Sujarweni, 2021)

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki keunggulan dalam bidang memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya, utamanya pada sektor pertanian tanaman pangan perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan rumah makan/restoran. Usaha menengah memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan kehutanan. Usaha besar memiliki keunggulan dalam industri pengolahan, listrik, gas, komunikasi, dan pertambangan. Oleh karena itu membuktikan bahwa UMKM dan usaha besar saling melengkapi dan saling membutuhkan, meskipun pada kenyataannya UMKM lebih dominan dalam penyerapan tenaga kerja hingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional.

Pemerintah memiliki kewajiban dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, berkesinambungan dalam pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan serta potensi dari Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam mewujudkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan, dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pengentasan kemiskinan . Kontribusi yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto masih rendah jika dibandingkan dengan industri besar yang menghasilkan 40% dari PDB, Padahal jumlah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia sangatlah besar yaitu 99% dari pelaku usaha di Indonesia (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2021).

Perkembangan dan pertumbuhan UMKM pun cukup bagus dari tahun ke tahun. Hampir dari setiap pemerintahan menekankan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pemerintah secara serius memberikan perhatian terhadap sektor usaha ini, alasannya adalah usaha kecil mikro menengah (UMKM) merupakan tulang punggung dalam penyediaan tenaga kerja dan lapangan kerja, karena beberapa perusahaan sudah menekankan penggunaan teknologi daripada tenaga kerja manusia. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat penting memperhatikan UMKM, UMKM mempunyai kinerja lebih baik dalam tenaga kerja yang produktif, meningkatkan produktivitas tinggi, dan mampu hidup di sela-sela usaha besar. UMKM mampu menopang usaha besar, seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang, dan bahan pendukung lainnya. UMKM mampu menjadi ujung tombak bagi usaha besar dalam menyalurkan dan menjual produk dari usaha besar ke konsumen.

Dalam perkembangannya usaha kecil mikro menengah (UMKM) pada Provinsi Jawa Barat memiliki perkembangan yang cukup signifikan dalam hal ini perkembangan yang terjadi tidak terlepas dari perputaran perekonomian mikro pada Provinsi Jawa Barat.

mencatatkan jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebanyak 279.705 usaha mikro kecil menengah (UMKM), pada tahun 2020 yang dimana awal mula adanya pembatasan sosial atas peristiwa covid-19 usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang bertumbuh menjadi 297.011, dan pada tahun 2021 puncak dari peristiwa dan masa transisi penyakit covid-19 jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kabupaten karawang tumbuh secara signifikan dibandingkan tahun 2020, pada tahun 2021 usaha mikro kecil menengah yang ada di Kabupaten Karawang berjumlah 315.388. Hal ini membuktikan bahwa usaha mikro kecil dan menengah merupakan sebuah pilar penting bagi perekonomian di Indonesia khususnya Kabupaten Karawang, dengan terus bertumbuhnya jumlah usaha mikro kecil menengah pada tiga tahun terakhir.

Selain perkembangan UMKM, penggunaan sistem transaksi pembayaran yang sudah di gunakan pada proses transaksi UMKM saat ini makin bervariasi dimana sistem pembayaran pada UMKM saat ini memiliki keunggulan yang memudahkan transaksi UMKM, sistem pembayaran yang sedang menjadi prioritas pada transaksi non tunai antara lain, Gopay, Ovo, Shopeepay, dan juga *Quick Responses Code Indonesia Standar* (QRIS).

Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) merupakan sebuah sistem gabungan dari berbagai macam penyelenggara sistem pembayaran (PJSB) yang menggunakan teknologi QR code. *Quick Response Code Indonesia Standar* (QRIS) merupakan sistem yang dikembangkan bersama Bank Indonesia agar dalam proses transaksi dengan teknologi QR code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran yang akan menggunakan QR code merupakan pembayaran yang wajib menggunakan dan menerapkan QRIS. Dalam penggunaan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun baik bank dan nonbank yang digunakan oleh masyarakat, dapat digunakan oleh seluruh pedagang, toko, dan warung, dan donasi.

Di Indonesia Standar (QRIS) hanya dapat mengakomodir 2 model penggunaan QR code pembayaran yaitu Merchant Presented Mode (MPM) dan Customer Presented Mode (CPM). Namun dalam pengimplementasiannya dapat mengacu pada standar *Quick Response Code Indonesia Standar* (QRIS) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai sebuah standar nasional. (Perdana & Sinarwati, 2022:23)

Peranan sistem teknologi tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi pemilik perusahaan atau UMKM tidak bisa terlepas dari peranan dan perkembangan sistem teknologi untuk memudahkan dan memperlancar bisnis yang

dijalankannya. Peranan Sistem teknologi dalam dunia usaha mampu meningkatkan efisiensi dan mampu membuat para pemilik usaha melakukan hal yang biasanya terlihat sulit menjadi mudah. (Kurnia, 2020:34)

Dalam proses transaksi di zaman sekarang ini sudah memiliki kemajuan yang sangat pesat dimana terdapat berbagai macam proses transaksi yang digunakan oleh banyak UMKM. Dalam proses transaksi dari sebuah peristiwa yang menimpa seluruh dunia yaitu pandemi covid-19 dimana proses transaksi itu berkembang ke arah yang menggunakan sistem teknologi terutama dalam bidang pembayaran dikarenakan pada saat pandemic covid-19 ada banyak keterbatasan ruang gerak dalam beraktivitas maka dari itu sebuah inovasi dalam transaksi pembayaran yang menggunakan smartphone dan kegunaan dari kamera hpnya serta penerapan e-money yang ada di Indonesia menciptakan sebuah solusi pembayaran terbaru berupa *Quick Response Code Indonesia Standar* (QRIS) sebagai solusi dalam transaksi pembayaran tanpa adanya fisik dari uang yang digunakan. (Setiawan & Mahyuni, 2020)

Proses transaksi pada *Quick Response Code Indonesia Standar* (QRIS) terdiri atas penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga Switching, Merchant Aggregator; dan pengelola National Merchant Repository. Pihak yang dapat melakukan pemrosesan transaksi pada *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) merupakan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang masih termasuk dalam kelompok Penyelenggara dalam Jasa Sistem Pembayaran front end seperti Penerbit atau Acquirer, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan Lembaga Switching dalam melaksanakan kegiatan dalam pemrosesan Transaksi Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) wajib mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia (BI). Transaksi yang ada *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) dalam menggunakan sumber dana bisa berupa simpanan atau instrumen berupa kartu debit, kartu kredit, atau uang elektronik yang menggunakan sebuah media penyimpanan server based. Penggunaan dana atau instrument pembayaran yang ada pada *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) berdasarkan usulan dari lembaga standar yang telah disetujui oleh Bank Indonesia, Pada transaksi yang ada dalam *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) dibatasi paling banyak sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) per transaksi. (Website Bank Indonesia).

Penetrasi dari ponsel yang ada di Indonesia sangat besar, sehingga proses transaksi menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) akan terus meningkat. Pasalnya, saluran pembayaran berpotensi untuk diperluas kedepannya. Dalam

wawancaranya Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Santoso Liem mengungkapkan “Dengan menggunakan HP (Handphone/Ponsel) sebagai issuance ini tentu lebih memudahkan daripada kartu, Ke depan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) akan terus meningkat. Kami percaya *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) akan terus berkembang, bahkan tidak hanya statis juga dinamis” (Kompas.com). Perkembangan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) saat ini di Indonesia cukup baik, dimana dalam hal ini mempermudah konsumen atau UMKM yang kesulitan pada setiap proses transaksi tunai yang memiliki banyak risiko didalamnya (Ana Sriekaningsih, 2020:21).

Gambar 1.2 Grafik Merchant Pengguna *Quick Responses Code Indonesia Standar*

Sumber : Katadata.com, 2021

Jumlah merchant pengguna dari *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) di Indonesia di tahun 2020 sudah mencapai 12,2 juta pengguna meliputi usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro, dan Dinas/Sosial. Dalam hal ini pertumbuhan yang sangat signifikan ada pada usaha mikro dengan total pengguna pada bulan November 2021 mencapai 7 juta pengguna, ini terlihat dari manfaat yang diberikan bagi pengguna *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) dalam memfasilitasi proses transaksi yang dilakukan oleh para UMKM yang ada di Indonesia. (katadata.co.id)

Beberapa alasan yang dijadikan landasan Bank Indonesia mewajibkan penggunaan sistem pembayaran QRIS kepada semua PJSP berbasis QR Code adalah untuk mewujudkan sebuah standarisasi penggunaan dari QR Code sebagai sebuah sistem pembayaran nontunai sehingga terciptalah efisiensi transaksi, memajukan UMKM, mempercepat inklusi keuangan, yang pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan di sektor perekonomian di Indonesia (Bank Indonesia).

Keuntungan menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) bagi UMKM atau bisnis adalah menjadikan transaksi menjadi lebih cepat, proses jual beli lebih mudah, metode pembayaran yang variative, mencegah peredaran uang palsu, keamanan transaksi terjamin, dan mencatat transaksi. Banyak sekali keuntungan yang didapatkan jika transaksi menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) yang seharusnya lebih ditingkatkan oleh para UMKM dengan menggunakan transaksi pembayaran menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS). (Sirclo.com)

Dibalik keuntungan menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) pada proses transaksi ada risiko yang yang sering dialami oleh pengguna *Quick Responses Code Indonesia Standard* (QRIS) ialah sering erornya kode batang saat prose penscana kode batang, dan juga pada proses transaksi menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) ketika jaringan pada ponsel yang digunakan untuk melakukan proses transaksi tidak stabil yang mengakibatkan eror pada saat dibukanya aplikasi yang menyebabkan kegagalan dalam proses pembayaran yang ada pada *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS). Menurut pendapat pakar keamanan cyber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha mentakan risiko yang bisa di dapatkan pada penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) adalah banyaknya QR Code palsu yang mengarahkan ke rekening lain dan ke website bersisi malware yang bisa berakibat kebocoran data dari pengguna Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS). (Geotimes.id)

Terazz *Foodcourt* merupakan tempat makan yang berada di Jl. Banten No. 9 Karang Pawitan Kabupaten Karawang Barat dekat dengan SMA Negri 3 Karawang dan SMKN 2 Karawang, yang berisikan sekitar 9 UMKM yang terdiri dari yang menjual minuman, makanan ringan dan makanan berat. Terazz *FoodCourt* merupakan sebuah tempat makan yang dekat dengan dua sekolah dan sebuah landmark di Karawang menjadikan Terazz *Foodcourt* merupakan sebuah tempat makan yang sangat strategis dan menjadi tempat yang rekomendasi untuk dikunjungi pada saat jam makan siang dan juga malam hari.

Gambar 1.3 Foto Terazz Foodcourt

Sumber : Observasi Peneliti, 2023

Seluruh UMKM yang berada pada Terazz Foodcourt sudah menggunakan teknologi pembayaran yang diciptakan oleh pemerintah pada saat pandemi Covid-19 yang lalu yaitu pembayaran menggunakan kode batang atau biasa disebut Quick Responses Code Indonesia Standard (QRIS) yang dimana sistem ini diciptakan untuk memudahkan dan untuk menghindari transaksi secara tunai pada saat pandemi Covid-19 terjadi dua tahun yang lalu. Namun pada implementasinya pada Terazz Foodcourt masih banyak transaksi yang menggunakan uang tunai dan masih banyak UMKM didalamnya yang masih terkendala oleh penukaran uang kembalian padahal dengan diciptakannya Quick Response Indonesia Code Standard (QRIS) kemudahan transaksi yang memudahkan keduanya dari segi UMKM tidak perlu kesulitan mencari uang kembalian dari para konsumen tidak perlu mengeluarkan atau mencari uang yang nilainya lebih kecil jika tidak ada uang kembalian.

Gambar 1.4 Proses Penukaran Uang Kembalian

Sumber : Observasi Peneliti, 2023

Hal ini masih terjadi karena kurangnya penawaran dan informasi untuk melakukan pembayaran non tunai oleh pihak UMKM dalam penggunaan pembayaran non tunai pada

setiap transaksi yang ada, karena pada proses transaksi seperti yang diungkapkan oleh Bu Tuti (Penjual Pada Kedai Laperpool) “Transaksi melalui non tunai (QRIS) jarang ditawarkan, dikarenakan banyaknya konsumen yang lebih memilih pembayaran tunai atau cash menjadikan pembayaran yang masih sering dilakukan sampai saat ini. Pembayaran menggunakan uang cash atau tunai diperlukan untuk berbelanja bahan baku dan juga kelemahan dari transaksi menggunakan uang tunai adalah harus mengembalikan pengembalian uang dan ada kemungkinan konsumen melakukan membayar dengan uang palsu yang mengakibatkan kerugian sehingga pencatatan keuangan UMKM belum bisa terlaksana dengan baik”. Satu hal yang mempengaruhi kurangnya minat transaksi melalui non tunai menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) pada UMKM yang ada di Terazz Foodcourt yaitu sering terjadinya eror pada saat proses penscanan kode batang dari Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) dan tata letak untuk kode batang pada Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) yang masih kurang terjangkau oleh penglihatan konsumen biasanya kode batang ini dikeluarkan jika konsumen meminta melakukan pembayaran non tunai saja. Penerapan pembayaran non tunai ini didukung oleh belum adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pengelola Terazz Foodcourt untuk mewajibkan seluruh pembayaran pada UMKM yang ada di Terazz Foodcourt.

Gambar 1.5 Tata Letak Papan Qr yang kurang Maksimal

Sumber : Observasi Peneliti, 2023

Kurang maksimalnya penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) pada UMKM yang ada di Terazz Foodcourt karena kurangnya pemahaman akan pengetahuan tentang keuntungan dalam menggunakan sistem pembayaran non tunai menggunakan Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS) serta kurangnya pemahaman mengenai risiko dalam Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)

pada UMKM yang ada di Terazz Foodcourt. UMKM tidak memaksimalkan proses transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) karena adanya biaya 0,7% pertransaksi dan kebutuhan akan uang tunai dalam pembelian bahan baku.

Dalam penelitian ini menggunakan research gap Menurut (Risma & Sri, 2021) dalam penelitiannya penggunaan transaksi pada Quick Responses Code Indonesia Standard (QRIS) pada UMKM merupakan sebuah Langkah yang efektif untuk mengefisienkan percepatan pada saat proses transaksi dimana dalam hal ini penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) merupakan sebuah Langkah yang efektif untuk efisiensi waktu pada saat proses transaksi. Menurut (Perdana & Sinarwati, 2022) transaksi yang menggunakan Quick Responses Code Indonesia Standard (QRIS) masih belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih banyak pedagang ataupun masyarakat yang kurang mengerti akan fungsi dan manfaat dari aplikasi tersebut, dan kendala pada transaksi payment gateway berbasis QRIS masih sangat banyak diantaranya barcode yang sering eror dan tidak terbaca.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dapat dibuat sintesa bahwa penelitian tentang Analisis keuntungan dan risiko dalam penggunaan Quick Responses Code Indonesia Standard (QRIS) terhadap proses transaksi (Studi Kasus Terazz FoodCourt), diketahui bahwa proses transaksi menggunakan Quick Responses Code Indonesia Standard (QRIS) pada UMKM memiliki kelebihan tersendiri seperti dari segi efisiensi waktu dan tidak perlu menukarkan kembalian terlebih dahulu ketika UMKM tersebut tidak memiliki uang yang cukup untuk mengembalikan uang konsumen pada proses transaksi. Adapun penggunaan pada proses transaksi menggunakan Quick Responses Code Indonesia Standard (QRIS) pada UMKM masih banyak memiliki kendala seperti terkendala pada jaringan internet dan kode QR yang tidak bisa terbaca yang menjadikan penghambat pada proses transaksi UMKM.

Berdasarkan Research Gap diatas dan perbedaan hasil penelitian sebagai penguat fenomena yang ada, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Keuntungan dan Resiko Dalam Penggunaan Quick Responses Code Indonesia Standard (QRIS) Terhadap Proses Transaksi (Studi Kasus Terazz FoodCourt)**”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Masih adanya Proses transaksi pada UMKM di Terazz FoodCourt yang menggunakan uang tunai sehingga menghambat proses transaksi.
2. Kurangnya pemahaman pelaku UMKM akan keuntungan menggunakan Quick Responses Code Indonesia Standard (QRIS) pada proses transaksi
3. Tidak adanya tawaran dalam menggunakan Quick Responses Code Indonesia Standard (QRIS) pada saat proses transaksi kepada pelanggan
4. Tata letak papan Quick Responses Code Indonesia Standar (QRIS) yang masih belum maksimal dan kurang terlihat oleh konsumen
5. Kurangnya pemahaman risiko yang didapatkan oleh UMKM dalam menggunakan Quick Responses Code Indonesia Standard (QRIS) pada proses transaksi.
6. Belum adanya kebijakan dari pengelola yang mewajibkan penggunaan Quick Responses Code Indonesia Standard (QRIS) dalam proses transaksi yang ada pada terazz food court
7. Pencatatan transaksi UMKM yang masih belum terlaksana dengan baik
8. Maraknya transaksi pembayaran non tunai yang menggunakan uang palsu
9. Kurangnya minat konsumen dalam menggunakan Quick Responses Code Indonesia Standart (QRIS) pada proses transaksi.
10. Sering terjadinya eror pada saat transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)
11. Dikenakannya biaya sebesar 0,7% per transaksi.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan ataupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Beberapa batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi dengan peminatan manajemen keuangan.
2. Objek dari penelitian ini merupakan UMKM yang berada pada Terazz *FoodCourt* Karawang
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada keuntungan sebelum dan sesudah UMKM menggunakan *Quick Responses Code Indonesia Standart* (QRIS) pada proses transaksi

4. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan triangulasi, bertujuan untuk mengetahui apakah ada risiko yang didapatkan oleh UMKM dalam menggunakan *Quick Responses Code Indonesia Standard* (QRIS) pada proses transaksi

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keuntungan sebelum dan sesudah menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) pada proses transaksi?
2. Bagaimana risiko yang di dapatkan oleh UMKM terhadap penggunaan Quick Responses Code Indonesia Standard (QRIS) dalam proses transaksi?
3. Apakah proses transaksi menggunakan Quick Responses Code Indonesia Standard (QRIS) lebih baik dibandingkan proses transaksi tidak menggunakan Quick Responses Code Indonesia Standard (QRIS)

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan keuntungan sebelum dan sesudah menggunakan Quick Responses Code Indonesia Standard (QRIS) terhadap proses transaksi
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan risiko yang di dapatkan oleh UMKM terhadap penggunaan Quick Responses Code Indonesia Standard (QRIS) dalam proses transaksi
3. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan proses transaksi menggunakan Quick Responses Code Indonesia Standard (QRIS) lebih baik dibandingkan proses transaksi tidak menggunakan Quick Responses Code Indonesia Standard (QRIS).

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diharapkan mempunyai manfaat dalam bidang pendidikan langsung ataupun tidak langsung, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai keuntungan dan risiko dalam menggunakan *Quick Responses Code Indonesia Standard* (QRIS) pada proses transaksi, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan

2) Manfaat Praktis

1. Penulis

Sebagai salah satu syarat akademik untuk meraih gelar sarjana Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang, dan dapat menambah ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan sistem yang diperlukan UMKM.

2. UMKM

Dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan proses transaksi menggunakan metode non tunai dengan *Quick Response Indonesia Standard* (QRIS), dan sebagai masukan dan pertimbangan untuk mendukung kebijakan penggunaan metode pembayaran non tunai secara keseluruhan pada *Terazz Foodcourt*.

3. Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan informasi dan perbandingan untuk pihak-pihak yang membutuhkan penulisan dan penelitian proses transaksi menggunakan non tunai dengan *Quick Responses Indonesia Standard (QR)*